

**PESANTREN BERBASIS MASYARAKAT**  
**(Studi Tentang Manajemen**  
**Pesantren al-Mubarak Lanbulan Sampang-Madura)**

*Mad Sa'i*

**I**

Pendidikan berbasis masyarakat sesungguhnya merupakan wacana baru yang muncul dalam dunia pendidikan, terutama bagi masyarakat Indonesia setelah pemerintah memberlakukan kebijakan desentralisasi dalam sistem pendidikan. Dalam wujud nyatanya pemerintah memberlakukan undang-undang otonomi daerah. Dalam hal ini tidak luput tentunya sistem pendidikan secara rasional mengikuti atas kebijakan desentralisasi tersebut. Desentralisasi pendidikan mengandung pemahaman bahwa pendidikan membutuhkan unsur berbasis kebutuhan masyarakat. Daerah diharapkan mampu membangun peradaban pendidikan sesuai dengan kebutuhan daerah itu sendiri.

Dengan demikian, lembaga pendidikan berusaha mencari jawaban dengan merespon kebutuhan daerah atau masyarakat. Salah satu respon otonomi sekolah yang merupakan imbas desentralisasi pendidikan adalah Manajemen Berbasis Sekolah (MBS). Gagasan besar MBS sekedar mereplikasi konsep dasar pengelolaan manajerial pendidikan yang diberlakukan di Amerika. Padahal nilai dasar MBS yang lebih memberi ruang partisipasi aktif masyarakat dalam proses pendidikan sudah menjadi bagian tak terpisahkan dari sistem pendidikan nasional kita. Pondok pesantren misalnya, diasumsikan dalam sistem pendidikannya telah memiliki konsep yang cukup signifikan atas tuntutan masyarakat di sekitarnya. Keberadaan pesantren tidak dapat dipisahkan dari kehidupan dan tuntutan umat karena pesantren mampu menjaga harmonisasi dengan masyarakat di sekitarnya sehingga eksistensinya sama sekali tidak terasing di tengah masyarakatnya. Hal ini menjadikan segala aktivitas pesantren mendapat sokongan penuh dari mereka.

Sejak bergulirnya modernisasi pendidikan Islam di berbagai belahan dunia, kebanyakan lembaga-lembaga pendidikan tradisional tergerus bahkan lenyap akibat tergilas pendidikan umum. Tidak demikian halnya dengan pesantren yang masih tetap eksis dan bahkan mampu bersanding dengan pendidikan modern hingga kini. Pesantren selama ini telah memberlakukan MBS atau lebih tepatnya manajemen berbasis masyarakat dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan. Walaupun pesantren dari sisi manajemen pendidikan, tidak memiliki akar akademis yang kompeten dalam mengatur sebuah administrasi pendidikan. Tetapi fakta menunjukkan pesantren telah menjadi lembaga pendidikan yang mampu hidup secara mandiri. Kemandirian itu tidak hanya dalam konsep pendidikan bagi para santrinya, tetapi termasuk pada pengelolaan pesantren dalam pendanaannya. Mastuhu melukiskan dengan tegas bahwa pesantren memiliki konsep biaya berapapun cukup, biaya berapapun tidak cukup.

Dengan demikian, MBS untuk sekolah negeri merupakan gagasan yang baru, tapi bagi pesantren bukan hal yang baru lagi. Namun demikian, belum ada cukup bukti yang menunjukkan pesantren telah memberlakukan manajemen tersebut.

Maka penelusuran secara mendalam tentang manajemen pengelolaan pesantren berbasis masyarakat menjadi penting dilakukan karena pesantren ini sama sekali belum tersentuh oleh proyek MBS pemerintah.

Berdasarkan uraian di atas, Pondok Pesantren al-Mubarak Lanbulan Kecamatan Tambelangan Kabupaten Sampang merupakan pesantren yang pengelolaan dan perkembangannya tidak lepas dari peran masyarakat meskipun peran sentral kyai masih berlaku. Hal ini disebabkan pengaruh pendiri pesantren pada awalnya cukup besar terhadap masyarakat di sekitarnya, hingga pada saat sekarang. Pesantren ini dirintis oleh KH. Muhammad Fathullāh, putera dari KH. Fathullāh dan Nyai Dewi Fatimah. Setelah wafat, kepemimpinan digantikan oleh puteranya yakni KH. ‘Abdul ‘Adīm Muhammad Fathullāh, KH. Ahmad Bārīzī Muhammad Fathullāh dan KH. Ahmad Ghazālī Muhammad Fathullāh sampai sekarang. Oleh karena itu untuk memperoleh hasil yang lebih komprehensif dirasa penting melakukan penelitian tentang Pesantren Berbasis Masyarakat; Studi tentang Manajemen Pondok Pesantren al-Mubarak Lanbulan Sampang Madura.

Penelitian pendidikan ini dibatasi pada lingkup keterlibatan dan pola relasi pesantren dengan masyarakat dalam pengelolaan Pesantren al-Mubarak Lanbulan Sampang. Penelitian ini akan menguraikan beberapa hal, antara lain: perumusan kurikulum, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, kesiswaan, pembiayaan dan hubungannya dengan masyarakat. Sedangkan tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini ialah untuk mengetahui manajemen pesantren berbasis masyarakat di Pesantren al-Mubarak Lanbulan Sampang, mengetahui peran-peran masyarakat dalam mengelola pesantren dan untuk mengetahui kontribusi Pesantren al-Mubarak Lanbulan Sampang terhadap Pemberdayaan atau pengembangan masyarakat.

Kaitannya dengan manajemen pendidikan maka teori modern lebih tepat untuk dijadikan cara pandang dalam memahami kondisi pendidikan yang dalam hal ini adalah pesantren. Pendekatan modern berdasarkan hal yang sifatnya situasional. Artinya orang menyesuaikan diri dengan situasi dihadapi dan mengambil keputusan sesuai dengan situasi dan kondisi lingkungan. Teori ini berasumsi bahwa manusia itu berlainan dan berubah, baik kebutuhannya, reaksinya, tindakannya yang semuanya bergantung pada lingkungan.

Banyak sekali penelitian mengenai pesantren, namun masih belum ditemukan adanya penelitian yang menyentuh pada manajemen secara komprehensif. Sebut saja penelitian tertua berkaitan dengan lembaga pendidikan Islam dilakukan oleh Dhofier untuk kepentingan disertasinya di Antropologi Sosial, *Australian National University* (ANU) Australia pada tahun 1980, Ali Mukayat meneliti tentang *Penerapan Manajemen Berbasis Sekolah* pada tahun 2004, As’ari, juga mencoba melakukan penelitian mengenai *Transparansi Manajemen Pesantren menuju Profesionalisme*, Basuki dengan judul *Peran Guru Tugas Pondok Pesantren Sidogiri dalam Pengembangan Learning Society (Studi Multi-Kasus di Pasuruan, Malang dan Ponorogo)*, M. Bahri Ghazali pada tahun 1995 dalam Disertasinya dengan judul *Pengembangan Lingkungan Hidup dalam Masyarakat, Kasus Pondok Pesantren an-Nuqayah dalam Menumbuhkan Kesadaran Lingkungan Hidup*, Pradjarta Dirdjasanyata dengan judul *Memelihara Umat, Kiai Pesantren, Kiai Langgar di Jawa*, Fentri Setiawan juga melakukan

penelitian dalam skripsinya yang berjudul *Manajemen Pesantren Studi Kasus di Pondok Pesantren Nurul Jadid Paiton Kabupaten Probolinggo*.

Berkaitan dengan keterlibatan masyarakat dalam pendidikan, Ummul Chusnah dalam tesisnya menulis tentang *Evaluasi Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Program Peningkatan Kualitas Sarana Prasarana Pendidikan Di SMA Negeri 1 Surakarta*. Nur Jihad, juga melakukan penelitian tentang Manajemen Partisipasi Masyarakat. Akan tetapi pembahasannya hanya sebatas mengenai bentuk manajemen partisipasi masyarakat yang dikembangkan oleh sekolah, faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi dan menggambarkan bentuk-bentuk partisipasi masyarakat.

Penelitian ini secara khusus ditujukan untuk memperoleh data dan fakta tentang pesantren berbasis masyarakat sebagai implementasi manajemen pesantren dan pola relasi antara masyarakat dan pesantren. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode etnografi. Sumber data secara garis besar terbagi ke dalam dua bagian, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber pertama melalui prosedur dan teknik pengambilan data yang dapat berupa wawancara, observasi, maupun penggunaan instrumen pengukuran yang khusus dirancang sesuai dengan tujuannya. Dalam penelitian ini, maka yang menjadi sumber pertama ialah Pengasuh pesantren atau pengurus pesantren dan tokoh masyarakat setempat. Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber tidak langsung yang biasanya berupa data dokumentasi dan arsip-arsip resmi.

Sedangkan teknik/metode pengumpulan data ialah dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Kemudian agar diperoleh data yang akurat maka dianalisis dengan cara deduktif dan induktif.

## II

Pendidikan pada hakikatnya merupakan cerminan kondisi negara dan kekuatan sosial-politik yang tengah berkuasa. Pendidikan dengan sendirinya merupakan refleksi dari orde penguasa yang ada. Masalah pendidikan akan menjadi masalah politik apabila pemerintah ikut terlibat di dalamnya. Bahkan menurut Michael W. Apple sebagaimana dikutip H.A.R. Tilaar, kurikulum pendidikan yang berlaku sebenarnya merupakan sarana indoktrinasi dari suatu sistem kekuasaan. Melalui kurikulum, pemerintah telah menjadikan pendidikan sebagai sarana rekayasa dalam rangka mengekalkan struktur kekuasaannya. Oleh karena itu, masalah pendidikan sesungguhnya adalah masalah politik, tapi bukan dalam artian yang praktis. Diakui Paulo Freire, sekolah memang merupakan alat kontrol sosial yang efisien bagi upaya menjaga *status qua*.

Adapun pendidikan berbasis masyarakat menurut Sihombing merupakan pendidikan yang dirancang, dilaksanakan, dinilai dan dikembangkan oleh masyarakat yang mengarah pada usaha menjawab tantangan dan peluang yang ada di lingkungan masyarakat tertentu dengan berorientasi pada masa depan. Dengan kata lain, pendidikan berbasis masyarakat adalah konsep pendidikan dari masyarakat, oleh masyarakat dan untuk masyarakat. Dengan ini, Sihombing menegaskan bahwa yang menjadi acuan dalam memahami pendidikan berbasis

masyarakat adalah pendidikan luar sekolah, karena pendidikan luar sekolah itu bertumpu pada masyarakat, bukan pada pemerintah.

Pendidikan berbasis masyarakat sesungguhnya bukan hanya dapat dilaksanakan melalui jalur pendidikan luar sekolah (nonformal), sebagaimana diungkapkan Sihombing dan Supriadi di atas. UU No. 20 Tahun 2003 pasal 13 ayat 1 menyebutkan bahwa Jalur pendidikan terdiri atas pendidikan formal, nonformal, dan informal yang dapat saling melengkapi dan memperkaya. Oleh karena itu, pendidikan berbasis masyarakat dapat juga mengambil jalur formal, nonformal dan informal. Dalam kaitan ini, Gilbraith menyebutkan bahwa *“The concept of community based education and lifelong learning, when merged, utilizes formal, nonformal, and informal educational processes”*. Pendidikan berbasis masyarakat dengan proses formal biasanya merupakan pendidikan yang diselenggarakan oleh organisasi birokrasi formal semisal sekolah atau universitas. Pendidikan berbasis masyarakat dengan proses nonformal dapat mengambil bentuk pendidikan di luar kerangka sistem formal yang menyediakan jenis pelajaran terpilih, seperti di perpustakaan atau museum. Adapun pendidikan berbasis masyarakat dengan proses informal merupakan pendidikan yang diperoleh individu melalui interaksinya dengan orang lain di tempat kerja, dengan keluarga, atau dengan teman.

Pendidikan berbasis masyarakat juga tidak dapat dipisahkan dari pandangan yang menyatakan bahwa pada dasarnya pendidikan merupakan kegiatan yang bersifat sosial. Berbagai komponen pendidikan, seperti visi, misi, tujuan, dasar, kurikulum, metode, guru yang dibutuhkan, evaluasi, lulusan, sarana dan prasarana pendidikan harus dirancang sesuai kebutuhan masyarakat. Karena paling tidak output suatu lembaga pendidikan harus berguna dalam kehidupan masyarakat.

Dalam konteks ini, pondok pesantren yang merupakan salah satu bentuk pendidikan berbasis masyarakat, telah lahir dan berkembang dari masyarakat. Secara historis, munculnya pesantren tidak lepas dari keinginan masyarakat akan pentingnya pusat pendidikan Islam di Indonesia, karena pesantrenlah yang pada mulanya sebagai representasi dari lembaga pendidikan Islam di tanah air. Hingga saat ini, keberadaan pesantren tidak lepas dari peran serta masyarakat, baik dari pengelolaan maupun dalam hal pemberdayaannya. Di samping itu, pesantren juga berfungsi sebagai lembaga dakwah, pengkaderan ulama’, pengembang ilmu pengetahuan (khususnya ilmu agama) serta pengembangan masyarakat. Dari sanalah sudah jelas bahwa keterkaitan pesantren dengan masyarakat sangatlah erat, bahkan bisa dikatakan “pesantren tanpa masyarakat tidak akan berkembang”. Dengan adanya keterlibatan masyarakat dalam pesantren, maka pesantren tidak akan kehilangan fungsi utamanya.

Pesantren merupakan suatu sistem kehidupan yang lahir di dalam kondisi masyarakat tertentu. Maka dari itu, sebenarnya pesantren dikelola oleh masyarakat yang memilikinya. Meskipun dalam pengelolaannya banyak ditentukan oleh kiai sebagai pemiliknya, tidak dapat disangkal bahwa kehidupan pesantren telah ditopang dan dibesarkan oleh masyarakat. Apabila dewasa ini sering dibahas inovasi pendidikan nasional untuk melahirkan pendidikan yang dikelola oleh masyarakat, maka pesantrenlah yang menjadi model asli dari sistem pendidikan tersebut.

Manajemen sering diartikan sebagai ilmu, kiat dan profesi. Dikatakan sebagai ilmu oleh Luther Gulick karena manajemen dipandang sebagai suatu bidang pengetahuan yang secara sistematis berusaha memahami mengapa dan bagaimana orang bekerja sama. Dikatakan sebagai kiat karena manajemen mencapai sasaran melalui cara-cara dengan mengatur orang lain dalam menjalankan tugas. Sedangkan dikatakan sebagai profesi karena manajemen dilandasi oleh keahlian khusus untuk mencapai suatu prestasi. Kegiatan manajemen dalam berbagai aktifitas secara umum berperan merencanakan, mengorganisir, menggerakkan, melakukan evaluasi dan melakukan pengontrolan.

Manajemen berbasis masyarakat merupakan upaya melibatkan masyarakat dalam mengelola suatu organisasi atau lembaga agar tercapai tujuan yang diinginkan bersama. Sedangkan dalam dunia pesantren, partisipasi masyarakat tidak melembaga layaknya di sekolah (komite sekolah). Kebijakan di pesantren tetap menjadi hak otoritas kyai selaku pengasuh dan pusat dari segala kebijakan. Oleh karenanya, masyarakat tidak memiliki ruang atau hak untuk mengevaluasi pesantren. Masyarakat bisa berpartisipasi melalui batasan-batasan tertentu, dalam artian tidak pada hal yang dianggap signifikan dalam pengelolaan pesantren.

Ini mempertegas bahwa manajemen berbasis masyarakat di sekolah tidak sama dengan manajemen berbasis masyarakat di pesantren. Meski pesantren telah lahir, tumbuh dan berkembang di masyarakat. Padahal akar dari manajemen ini berangkat dari manajemen alamiah pesantren yang tidak memiliki akar akademis yang baik.

Dalam melakukan pemberdayaan masyarakat, maka pesantren dapat melihat dari tiga sisi. *Pertama*, menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (*enabling*). *Kedua*, memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat (*empowering*). *Ketiga*, memberdayakan mengandung pula arti melindungi. Dalam proses pemberdayaan, harus dicegah yang lemah menjadi bertambah lemah, oleh karena kekurangberdayaan dalam menghadapi yang kuat. Oleh karena itu, perlindungan dan pemihakan kepada yang lemah amat mendasar sifatnya dalam konsep pemberdayaan masyarakat. Melindungi tidak berarti mengisolasi atau menutupi dari interaksi, karena hal itu justru akan mengerdilkan yang kecil dan melunglaikan yang lemah. Melindungi harus dilihat sebagai upaya untuk mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang, serta eksploitasi yang kuat atas yang lemah. Pemberdayaan masyarakat bukan membuat masyarakat menjadi makin tergantung pada berbagai program pemberian (*charity*). Karena, pada dasarnya setiap apa yang dinikmati, harus dihasilkan atas usaha sendiri (yang hasilnya dapat dipertukarkan dengan pihak lain). Dengan demikian, tujuan akhirnya adalah memandirikan masyarakat, memampukan, dan membangun kemampuan untuk memajukan diri ke arah kehidupan yang lebih baik secara sinambung.

Kemudian dalam pemberdayaan masyarakat, setidaknya pesantren memiliki peran sebagai berikut, pertama, penyiapan sumber daya manusia yang berkualitas. *Kedua*, pondok pesantren sebagai aset masyarakat yang dapat mengakses perubahan secara mandiri. Dan *Ketiga*, output pondok pesantren yang memiliki kemandirian kiranya juga cukup relevan dengan proses pengembangan masyarakat, terutama di era desentralisasi saat ini. Jadi, meskipun sebagai

lembaga pendidikan Islam, pesantren tidak hanya memiliki peran di bidang keagamaan saja, melainkan bidang kehidupan lainpun juga tersentuh oleh pesantren.

### III

Penelitian ini menghasilkan beberapa hal, di antaranya sebagai berikut: *pertama*, manajemen pesantren berbasis masyarakat di pesantren baik dalam aspek perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan atau penilaian pada bidang kurikulum, sarana prasarana, keuangan, pendidik dan tenaga kependidikan, kesarifan, dan evaluasi pembelajarannya, yang dalam hal ini pesantren al-Mubarak Lanbulan Sampang tidak sepenuhnya sama dengan manajemen berbasis masyarakat di sekolah-sekolah. Masyarakat masih terbatas keterlibatannya dalam pengelolaan pesantren. Hanya sebagian kecil saja wilayah yang dapat disentuh langsung oleh masyarakat. Kebanyakan pengelolaannya ditangani langsung oleh pengasuh dan pengurus pesantren. Ini yang membedakan antara sekolah dengan pesantren. Namun, jika di Sekolah/Madrasah, maka keterlibatan masyarakat dapat diketahui melalui adanya Komite Sekolah/Madrasah serta Dewan Pendidikan.

*Kedua*, peran masyarakat sekitar pesantren Lanbulan dalam pengelolaan pesantren masih sangat kecil baik dalam bidang perumusan kurikulum, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana prasarana, keuangan, kesarifan, maupun evaluasi pembelajaran. Terdapat banyak titik penting yang harus dimasuki oleh masyarakat agar keinginan masyarakat lebih terakomodir oleh pesantren dan pesantren lebih peka terhadap keadaan masyarakat. Minimnya keterlibatan masyarakat dalam mengelola pesantren disebabkan oleh sikap eksklusivitas pesantren yang menyebabkan masyarakat enggan untuk berpartisipasi penuh. Serta manajemen kepemimpinannya yang masih menggunakan kepemimpinan berpusat pada kyai.

*Ketiga*, kontribusi pesantren dalam pemberdayaan dan pengembangan masyarakat cukup besar. Hal ini disebabkan pesantren tidak hanya bergerak pada aspek keagamaan saja melainkan juga aspek-aspek yang lain dalam kehidupan masyarakat dimasuki. Misalnya, pendidikan dan pengajaran, sosial budaya, muamalah dan sebagainya. Akan tetapi masih harus melakukan upaya atau terobosan-terobosan baru yang lebih realistis dengan kondisi masyarakat di sana.

### IV

Kesimpulan dari penelitian ini ialah, *pertama*, pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam di Indonesia yang memiliki kekhasan Indonesia dan perlu adanya pengembangan dalam menyelaraskan dengan kehidupan sekarang. Pesantren al-Mubarak Lanbulan Sampang merupakan salah satu pesantren yang berusaha menuju kondisi yang demikian. Dengan segala upaya yang telah dilakukan, maka setidaknya itu merupakan langkah awal dalam rangka menjawab

pertanyaan-pertanyaan yang sering bermunculan dan menuntut pesantren agar selalu memainkan perannya baik sebagai lembaga pendidikan Islam maupun sebagai institusi sosial.

*Kedua*, manajemen pesantren berbasis masyarakat dalam hal ini pesantren Lanbulan tidak seperti manajemen pendidikan berbasis masyarakat di Sekolah/Madrasah. Jika dalam pesantren, meski masyarakat merupakan basis sosialnya, tidak sepenuhnya ikut andil dalam pengelolaan pesantren. Pengelolaan pesantren ditangani langsung oleh pengasuh dan pengurus. Akan tetapi jika di Sekolah/Madrasah, masyarakat ikut andil sepenuhnya melalui Komite Sekolah/Madrasah dan Dewan Pendidikan.

*Ketiga*, peran masyarakat sekitar pesantren Lanbulan yang paling nampak ialah dalam menyediakan sarana prasarana pembelajaran pesantren, penggalian dan pengelolaan keuangan pesantren serta dalam bidang kesarifan. Akan tetapi masih terdapat banyak titik penting yang harus dimasuki oleh masyarakat agar keinginan masyarakat lebih terakomodir oleh pesantren dan pesantren lebih peka terhadap keadaan masyarakat.

*Keempat*, sumbangsih/kontribusi pesantren terhadap pemberdayaan dan pengembangan masyarakat sudah banyak, baik kontribusi pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam, institusi sosial dan melakukan dakwah. Akan tetapi masih harus melakukan upaya atau terobosan-terobosan baru yang lebih realistis dengan kondisi masyarakat di sana.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis yang kemudian dianalisis maka pesantren Lanbulan masih harus lebih meningkatkan upaya-upaya dalam rangka membangun dan memberdayakan masyarakatnya. Di antara upaya-upaya dimaksud ialah sebagai berikut: *pertama*, berkaitan dengan manajemen yang dilakukan pesantren Lanbulan, maka sangat penting untuk melakukan perbaikan manajemen, baik manajemen kesarifan, kurikulum, keuangan dan sebagainya. Hal ini diharapkan ada peningkatan kualitas sumber daya manusia pesantren yang dapat bersaing dengan dunia luar.

*Kedua*, meskipun penerapan manajemen berbasis masyarakat di pesantren dengan Sekolah/Madrasah tidak sama, setidaknya masyarakat diberikan ruang yang seluas-luasnya untuk ikutserta dalam membangun pesantren. Kebutuhan masyarakat tidak sama antara yang satu dengan yang lainnya, sehingga sikap pesantren diharapkan lebih terbuka akan kebutuhan dan keinginan masyarakat.

*Ketiga*, implementasi tri darma pesantren; pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, perlu dilakukan dan dikembangkan oleh pesantren Lanbulan. Karena selama ini, pesantren hanya menggalakkan pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat. Aspek penelitian seharusnya juga menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari aspek pendidikan supaya pemahaman teoritis santri dapat dipadukan dan dikontekstualisasikan dengan kehidupan manusia.

*Keempat*, program atau kontribusi pesantren lebih ditingkatkan lagi terutama yang berkaitan dengan kondisi masyarakat yang notabene adalah petani, yakni dengan memberikan wawasan modern dengan aplikasinya mengenai dunia pertanian. Serta wawasan mengenai politik setidaknya juga diberikan pesantren

kepada masyarakat agar masyarakat tidak menjadi pengikut buta jika ada pemilihan umum.